



**Dinas Sosial
Kabupaten Blitar**

RANCANGAN STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029

DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

**Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 38 Blitar
Telp/Fax [0342] 801357**



website : www.dinsos.blitarkab.go.id



email : dinsos@blitarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 telah selesai disusun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Blitar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan penjabaran visi misi Bupati Blitar dan disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target kinerja dan pendanaannya untuk periode 5 tahun ke depan.

Kami menyadari dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya semua pihak yang berkepentingan diharapkan dapat memberikan masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun menuju arah perbaikan agar terwujud Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas.

Blitar, 17 Juli 2025

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL,



SRI NURYANTI, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19721025 199301 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	67
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
BAB VIII PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang	12
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal	12
Tabel 2.3	Aset / Modal Dinas Sosial Kabupaten Blitar	13
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024	18
Tabel 2.5	Data PSKS Sasaran Garapan Dinas Sosial Tahun 2024	24
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Blitar	27
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	33
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	37
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial terhadap Sasaran Renstra Kementerian Sosial	41
Tabel 3.4	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	44
Tabel 3.5	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031	50
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Blitar	57
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Misi 1)	64
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Misi 1)	66
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial kabupaten Blitar	68
Tabel 6.2	Pemutakhiran Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	94
Tabel 6.3	Definisi Operasional Indikator Program	96
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	98
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	99
Tabel 7.3	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra OPD Dengan RPJMD	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Blitar	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai bagian dari amanat dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029.

Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kabupaten Blitar mengemban amanah menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dijelaskan mengenai kondisi terpebuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan cara memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

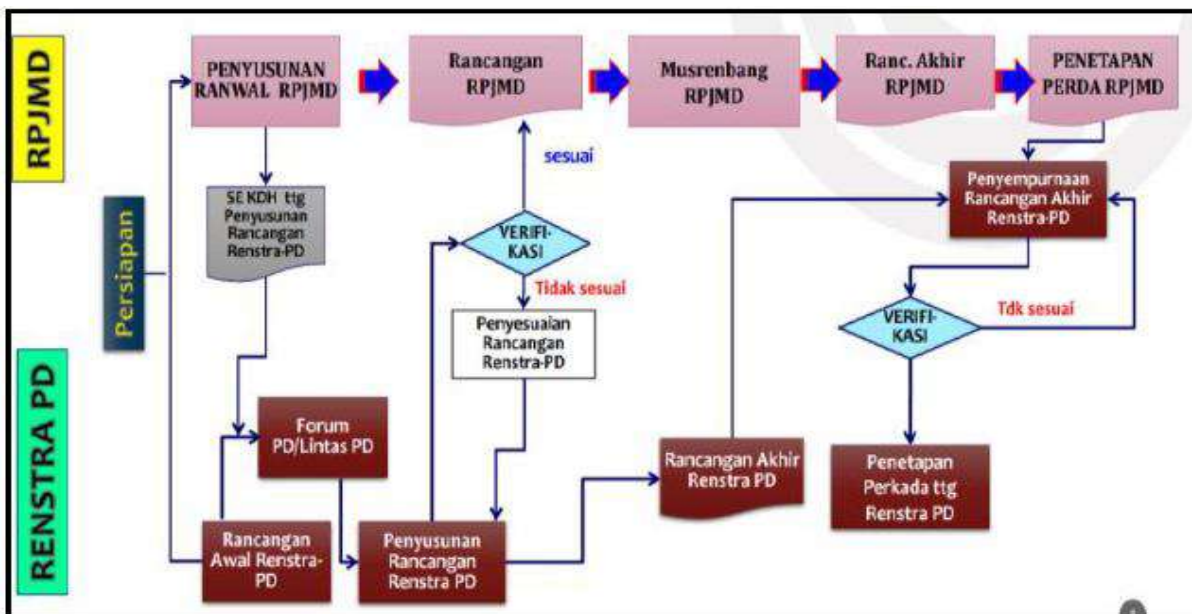
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Gambar 1.1

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra OPD Dengan RPJMD



Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar yang mengacu pada Visi Bupati yaitu **“KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA”** serta mengacu pada Misi Bupati yaitu **Misi 2** dan **Misi 4**. **Misi 2** yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana, sedangkan **Misi 4** yaitu Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Blitar 2025–2029 merupakan landasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan yang dimandatkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Selain itu Renstra ini juga akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan di bidang sosial. Renstra Dinas Sosial ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Rencana Kerja merupakan perencanaan tahunan yang menjadi dasar Dinas Sosial dalam Menyusun Anggaran dan Belanja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Pengisian Anggaran (DPA).

Keterkaitan Renstra Dinas Sosial dengan dokumen perencanaan lainnya baik RPJMD Kabupaten Blitar, Renstra Kementerian Sosial, maupun Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ditunjukkan dalam bentuk penyelarasan kebijakan dan target pembangunan di Bidang Sosial. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan warga migran korban tindak kekerasan serta program penanganan bencana. Dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Sosial dalam kurun waktu 2025-2029, sehingga target capaian Renstra diakhir periode perencanaan dapat terealisasi dengan baik. Ketercapaian target pembangunan bidang sosial tersebut diharapkan dapat berkontribusi besar dalam pencapaian misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. [Peraturan Presiden Nomor XX Tahun 20XX tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;](#)
11. [Peraturan Menteri terkait sesuai dengan urusan yang diampu;](#)
12. [Peraturan Menteri terkait Standar Teknis Pelayanan Dasar terkait Standar Pelayanan Minimal \(bagi perangkat daerah pengampu SPM\);](#)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031;
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor XX Tahun 20XX tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;](#)
15. [Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;](#) dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;

17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.
- b. Pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025-2029.
- c. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang sosial.
- d. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang sosial.
- e. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar muatan dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan pada pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menjelaskan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini disajikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini disajikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini disajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam periode pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi Sub bagian umum dan kepegawaian serta kelompok jabatan fungsional;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi kelompok jabatan fungsional; dan
- f. Bidang Penanganan Bencana membawahi kelompok jabatan fungsional.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Pembinaan UPT
- e. Pengoordinasian pelaksanaan urusan tata usaha Dinas; dan
- f. Pengoordinasian pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Adapun rincian tugas antara lain:

- a. **Kepala Dinas** mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.
- b. **Sekretaris** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan

urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas.

Untuk menjalankan tugasnya Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Blitar menjalankan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
- 2) Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 5) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 6) Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- 7) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- 10) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- 11) Pengelolaan kearsipan;
- 12) Pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

- c. **Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- 4) Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- 5) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

d. **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, yang meliputi kegiatan fasilitasi pengungsi, bantuan dan perlindungan sosial serta melaksanakan pembinaan dalam rangka pemberdayaan sosial.

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- 5) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

e. **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi, yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah sosial, penyandang disabilitas dan pengawasan panti dan lembaga sosial lainnya.

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Rehabilitasi Sosial menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - 5) Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan *human immunodeficiency virus/ acquired immune deficiency syndrome* untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi;
 - 6) Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi;
 - 7) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
 - 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.
- f. **Kepala Bidang Penanganan Bencana** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, yang meliputi kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakatan baik perorangan maupun kelompok dalam wilayah Daerah.

Untuk menjalankan fungsinya, Bidang Penanganan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- 4) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penanganan bencana; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Blitar



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Jumlah sumber daya manusia Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebanyak 41 orang terdiri dari 27 orang PNS dan 14 orang THL.

Komposisi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Blitar berdasarkan golongan/kepangkatan dan pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang

No.	Pangkat / Golongan Ruang	L	P	Jumlah
1.	Pembina Tk I (IV/b)	-	1	1
2.	Pembina (IV/a)	2	2	4
3.	Penata Tk. I (III/d)	3	4	7
4.	Penata (III/c)	-	2	2
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2	4	6
6.	Penata Muda (III/a)	2	4	6
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	1	1
8.	THL	10	4	14
Total		18	23	41

Sumber data: Dinas Sosial 2024

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	S2 (Pasca Sarjana)	3	2	5
2.	S1 (Sarjana)	10	15	25
3.	Diploma IV	1	1	2
4.	Diploma III	-	2	2
5.	SLTA	5	2	7
Jumlah		19	22	41

Sumber data: Dinas Sosial 2024

b. Sarana dan Prasarana

Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar antara lain:

Tabel 2.3**Aset/Modal Dinas Sosial Kabupaten Blitar**

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi
1.	Gedung Bangunan Kantor	1	Baik/ Terawat
2.	Shelter PMKS	1	Baik/ Terawat
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	5	Baik/ Terawat
4.	Kendaraan Dinas Roda 2	19	Baik/ Terawat
5.	Komputer PC	24	Baik/ Terawat
6.	Laptop	30	Baik/ Terawat
7.	Notebook	1	Baik/ Terawat
8.	TV	4	Baik/ Terawat
9.	Kamera	3	Baik/ Terawat
10.	AC	17	Baik/ Terawat
11.	Apar	9	Baik/ Terawat
12.	Pesawat Telpon	2	Baik/ Terawat
13.	Mesin Fax	1	Baik/ Terawat
14.	Meja Kursi Tamu	4	Baik/ Terawat
15.	Meja Kursi Rapat	85	Baik/ Terawat
16.	Meja Kursi Eselon 2	1	Baik/ Terawat
17.	Meja Kursi Eselon 3	5	Baik/ Terawat
18.	Meja Kursi Eselon 4	15	Baik/ Terawat
19.	Meja Kursi Kerja Staf	25	Baik/ Terawat
20.	Almari	7	Baik/ Terawat
21.	Filling Cabinet	21	Baik/ Terawat
22.	Printer	26	Baik/ Terawat
23.	Alat Penghancur Kertas	1	Baik/ Terawat
24.	Kipas Angin	11	Baik/ Terawat
25.	Layar Film/Projector	4	Baik/ Terawat
26.	Alat Komunikasi Radio VHF	12	Baik/ Terawat
27.	Papan Nama Instansi	2	Baik/ Terawat
28.	Teleskop	1	Baik/ Terawat
29.	Lemari Kaca	9	Baik/ Terawat

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi
30.	Tangga Aluminium	1	Baik/ Terawat
31.	Handycam	1	Baik/ Terawat
32.	Penyemprot Tangan	1	Baik/ Terawat
33.	Kasur/Springbed	8	Baik/ Terawat
34.	Sound System	4	Baik/ Terawat
35.	Rak Kayu	2	Baik/ Terawat
36.	HT	10	Baik/ Terawat
37.	Hard Disk	2	Baik/ Terawat
38.	Peralatan Jaringan	2	Baik/ Terawat
39.	Router	3	Baik/ Terawat
40.	Karpet Mushola	1	Baik/ Terawat
41.	Meja Komputer	3	Baik/ Terawat
42.	Mesin Cuci	1	Baik/ Terawat
43.	CCTV	1	Baik/ Terawat
44.	Penyemprot Mesin	2	Baik/ Terawat
45.	Wastafel Portabel	3	Baik/ Terawat
46.	Meja Resepsionis	1	Baik/ Terawat
47.	Dispenser	3	Baik/ Terawat
48.	Rak Besi	14	Baik/ Terawat
49.	Lemari Buku Arsip Dinamis	3	Baik/ Terawat
50.	Lemari Es	2	Baik/ Terawat
51.	Kompor Gas/DU	8	Baik/ Terawat
52.	Teko Listrik/DU	4	Baik/ Terawat
53.	Rice Cooker/DU	2	Baik/ Terawat
54.	Blender/DU	5	Baik/ Terawat
55.	Dandang/DU	5	Baik/ Terawat
56.	Coffee Maker/DU	6	Baik/ Terawat
57.	Tenda Pleton Tagana	3	Baik/ Terawat

Di samping sarana prasarana tersebut, Dinas Sosial mendapatkan fasilitas pinjam pakai kendaraan operasional dari Kementerian Sosial RI berupa 1 unit RTU, 1 unit mobil Dapur Umum Lapangan, 1 unit mobil LK3, dan 1 unit kendaraan roda 2. Sedangkan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendapatkan pinjam pakai 1 unit kendaraan roda dua TAGANA, 1 unit kendaraan roda dua TKSK, dan 3 unit kendaraan roda dua pendamping PKH.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2021-2023 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah sesuai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Blitar
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
INDIKATOR TUJUAN																		
1.	Persentase Penduduk Miskin						9,3	9,25	9,02	8,94	9,65	8,71	9,69	8,16	96	106	104	110
INDIKATOR SASARAN																		
1.	Persentase PPKS		√				11,62	11,51	11,31	9,19	9,65	11,31	9,19	8,76	83	98	80	95
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)																		
1.	Persentase PPKS yang Tertangani						100	100	100	100	98%	96,70	95,37	95,39	83	98	80	95
INDIKATOR KINERJA KHUSUS (IKK)																		
1.	Persentase PPKS		√				11,62	11,51	11,31	9,19	9,65	11,31	9,19	8,76	83	98	80	95
2.	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan		√				248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
3.	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)		√				0	44	44	44	44	44	44	44	100	100	100	100
4.	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)		√				22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100
5.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		√				3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100
6.	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan		√				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
7.	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin		√				5	5	5	5	0	5	5	5	0	100	100	100
8.	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat		√				628.842	628.842	628.842	628.842	591.636	880.188	758.049	702.160	94	140	121	112
9.	Peningkatan kapasitas pendamping PKH		√				153	153	153	153	141	146	128	128	92	95	84	84
10.	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos		√				23	23	23	23	32	24	27	36	139	104	117	157
11.	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos		√				45	45	45	45	444	346	337	380	987	769	748	844
12.	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar		√	√			27	27	27	27	160	743	0	230	593	757	0	230
13.	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi		√				150	200	200	200	178	400	400	400	119	200	200	200
14.	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial		√	√			20	20	20	20	14	6	101	19	70	30	505	95
15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		√	√			21	21	21	21	21	26	127	974	100	124	604	4.638

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
16.	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		√	√			1	1	1	1	0	1	36	60	0	100	3.600	6.000
17.	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		√	√			12	12	12	12	0	5	5.561	2.560	0	42	46.341	21.333

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi capaian IKU yaitu persentase PPKS yang tertangani tertinggi pada tahun 2021 sebesar 98%. Capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial berupa persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah ketersediaan anggaran dan sumber daya, baik yang berasal dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dana alokasi khusus (DAK), maupun sumber lainnya. Dukungan anggaran akan menentukan jangkauan dan volume layanan yang dapat diberikan, termasuk bantuan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan. Pada tahun tersebut juga dipengaruhi adanya dampak dari fenomena wabah covid-19, sehingga terjadinya pelonjakan jumlah PPKS maupun jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial.

Penurunan angka PPKS dipengaruhi dengan adanya komitmen para pemangku kebijakan dalam melaksanakan program penanganan PPKS yang meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan bencana, dan pemberdayaan sosial yang disinergikan dengan program-program pemerintah pusat antara lain program penanganan fakir miskin. Upaya memerangi kemiskinan merupakan salah satu program prioritas karena berdasarkan data yang diperoleh populasi fakir miskin memberikan kontribusi tertinggi pada angka PPKS di mana pada tahun 2021-2024 persentase fakir miskin sebanyak 9,65% dari total penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2021 dan angka PPKS menyentuh 11,31% pada tahun 2022 sehingga bisa dikatakan mengalami anomali yang signifikan. Hal ini disebabkan dampak ekonomi global yang dapat menyebabkan jumlah ketelantaran di Kabupaten Blitar serta penyandang disabilitas.

Sementara itu, data PPKS dari tahun ke tahun di Kabupaten Blitar cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosial. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Blitar berupaya melaksanakan penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan bencana. Dinas Sosial Kabupaten Blitar juga menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk PPKS. Bantuan sosial salah satu instrumen pendukung percepatan kemandirian dan kemampuan melaksanakan fungsi sosial dalam penanganan PPKS baik

berupa bantuan langsung tunai, modal usaha, maupun alat bantu kemandirian.

Dinas Sosial Kabupaten Blitar sepanjang periode Renstra 2021-2026 melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin di Kabupaten Blitar. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu, dijadikan acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah. Akan tetapi secara resmi, **pergeseran peran DTKS dari “data kemiskinan” menjadi “data registrasi sosial” mulai ditekankan sekitar tahun 2022.** Hal tersebut dikarenakan DTKS **tidak memilah secara kuantitatif** berdasarkan pengeluaran, pendapatan, atau garis kemiskinan resmi (seperti versi BPS). Artinya, DTKS tidak bisa digunakan untuk **mengukur** angka kemiskinan secara nasional atau regional. Tidak semua yang masuk DTKS otomatis dikategorikan miskin atau sangat miskin, namun bisa jadi masuk kategori rentan atau terdapat riwayat pernah menerima bantuan.

Peran DTKS saat ini menjadi **referensi untuk targeting bansos** (PKH, BPNT, dll) dan **digunakan oleh kementerian/lembaga** untuk menentukan siapa yang berhak menerima program perlindungan sosial. Lebih tepatnya **fungsi DTKS lebih sebagai social registry**, yaitu daftar individu dan rumah tangga yang berpotensi menerima bantuan sosial, bukan sebagai indikator statistik kemiskinan nasional. Adanya keterbatasan informasi terkait data kemiskinan tersebut, pada tahun 2022 Dinas Sosial mengeluarkan inovasi Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial (SIDAKSOS) sebagai basis data kemiskinan dan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Blitar.

Keterbatasan sarana prasarana rehabilitasi sosial lanjutan utamanya panti sosial dan anggaran adalah kendala yang sering dialami dalam upaya pelayanan rehabilitasi sosial karena merupakan kewenangan provinsi dengan kapasitas terbatas, sehingga pemberian layanan rujukan bagi PPKS tidak serta merta bisa dilakukan. Namun penguatan jejaring kesejahteraan sosial yang dengan balai/panti/lembaga/yayasan sosial baik milik pemerintah maupun swasta antar kabupaten/kota adalah alternatif yang tepat dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial PPKS. Keberadaan shelter/rumah singgah sangat bermanfaat sebagai upaya penanganan dini sebelum PPKS dirujuk ke daerah/lembaga lain. Namun sampai saat ini

pengelolaan shelter belum maksimal karena gedung terpisah dengan gedung kantor utama dan kekurangan tersedianya SDM pengelola.

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Sosial terus berupaya memotivasi dan meningkatkan kapasitas PSKS dalam upaya penanganan masalah sosial baik melalui pembinaan, bimbingan teknis, penguatan jejaring sosial juga pemberian apresiasi terhadap PSKS berupa insentif bulanan. Hasilnya, jumlah PSKS Kabupaten Blitar cukup meningkat dari tahun ke tahun dan melampaui target, kecuali pada SDM PKH dimana mengalami penurunan karena berdasarkan SK Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI bahwa pendamping PKH ditempatkan di wilayah atau domisilinya berasal.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Populasi PSKS sebagaimana hasil pemutakhiran data di tahun 2024 terdiri atas 10 jenis PSKS sebagaimana matriks di bawah ini:

Tabel 2.5

Data PSKS Sasaran Garapan Dinas Sosial Tahun 2024

NO	JENIS PSKS	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	3
2	Pekerja Sosial Masyarakat	136
3	Penyuluh Sosial	2
4	Taruna Siaga Bencana	48
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	21
6	Karang Taruna	183
7	Lembaga Kesejahteraan Sosial	36
8	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	27
9	Pendamping PKH	128
10	Pendamping Rehabilitasi Sosial	3
	JUMLAH	587

PSKS merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan riil dalam penanganan PSKS di sekitarnya. Peningkatan kapasitas PSKS merupakan upaya dalam mendorong kemampuan memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap percepatan penanganan PPKS.

Pada Indikator Kinerja Kunci Renstra periode 2021-2026 mengalami kenaikan hasil yang signifikan dari target dan tercapai secara memuaskan. Kinerja tersebut dicapai dengan terdiri beberapa program-program yang saling bersinergi. PPKS diberikan bantuan sosial dan program pelatihan keterampilan dengan harapan mereka bisa segera merintis usaha mandiri dalam sektor informal agar terentaskan dari kemiskinan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, belum semua alumni pelatihan mampu merintis dan atau mengembangkan usaha karena kendala permodalan dan akses pemasaran hasil usaha serta kurangnya pendampingan wirausaha.

Capaian kinerja Dinas Sosial rata-rata tercapai sesuai target. Komitmen pemangku kebijakan terutama dalam hal penganggaran dan sinergitas serta jejaring yang kuat antar Perangkat Daerah, PSKS, dan lembaga-lembaga sosial sangat mendukung pencapaian target kinerja. Lemahnya asesmen pemerlu pelayanan perlu terus dikuatkan sehingga pemberian layanan kesejahteraan sosial akan optimal. Sinergi program dan kegiatan dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta koordinasi yang baik dengan seluruh *stakeholder* sangat mendukung tercapainya target kinerja program.

Berdasarkan penyajian tabel dan analisis di atas dapat disimpulkan masalah atau kendala utama dalam pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya lanjut usia terlantar yang perlu penanganan mendesak seperti lansia yang memerlukan tempat tinggal yang layak namun untuk masuk ke panti tidak memenuhi persyaratan karena sering kali secara fisik sudah tidak lagi produktif dan tidak dapat beraktivitas kehidupan sehari-hari;
2. Banyaknya lansia yang terlantar karena keluarga tidak mau mengurus maupun menerima keberadaannya dengan alasan tertentu;
3. Banyaknya permasalahan sosial anak termasuk anak berhubungan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara seksual, maupun anak korban kekerasan fisik dan mental perlu mendapatkan penanganan termasuk pada keluarganya;
4. Perlindungan anak jumlah yang ditangani lebih banyak dan tidak bisa diprediksi karena tergantung banyak kasus anak yang muncul/dilaporkan;
5. Banyaknya penyandang disabilitas terutama disabilitas berat dan keluarganya yang membutuhkan pendampingan dan dukungan bantuan

- kebutuhan dasar ketidakmampuan penyandang disabilitas memahami instruksi dengan baik;
6. Sering ditemukan gelandangan baru (tiba-tiba muncul) baik gelandangan psikotik maupun gelandangan non psikotik;
 7. Belum maksimalnya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasca rawat inap di RSJ maupun rehabilitasi sosial di panti rehabilitasi sosial karena tidak adanya pendampingan obat bagi pasien sehingga pasien sering kambuh dan keluarga mengalami kendala dalam pendampingan ODGJ sehingga menjadi salah satu penyebab gelandangan;
 8. Belum maksimalnya kabupaten/kota memanfaatkan media penelusuran identitas gelandangan;
 9. Banyak PPKS yang sudah ditangani kembali ke kondisi semula karena tidak ada pendampingan lanjutan;
 10. Belum maksimalnya pemerintah menangani permasalahan anak jalanan (gelandangan anak) di Indonesia.

Dari sekian banyaknya permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Blitar, beberapa tindak lanjut yang dilaksanakan di antaranya adalah:

1. Pendekatan kepada keluarga maupun masyarakat untuk ikut peduli dan mau berpartisipasi dalam mengurus lansia terlantar karena permasalahan sosial lanjut usia adalah tanggung jawab bersama;
2. Berusaha semaksimal mungkin melakukan advokasi atau mencarikan panti yang bersedia menerima calon penerima manfaat lansia terlantar tidak mandiri;
3. Memberdayakan tenaga kesejahteraan sosial yang berada di daerah sebagai pendamping;
4. Melaksanakan pendataan dan pendampingan terhadap penyandang disabilitas terutama keluarganya atau perangkat desa/kelurahan setempat;
5. Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penanganan orang terlantar melalui cek biometrik;
6. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam hal penanganan ODGJ karena tergolong dalam kondisi sakit, penanganan yang dimaksud dalam hal pendampingan pengobatan;
7. Berkoordinasi melalui media sosial untuk proses penelusuran dan reunifikasi keluarga orang terlantar.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Blitar

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.614.888.584	5.897.675.908	6.037.864.271	5.368.142.655	5.237.156.732	5.723.391.045	5.659.065.603,50	5.046.629.436,54	93,3%	97,0%	93,7%	94,0%	-1,46	-1,21
2	Program Pemberdayaan Sosial	3.140.336.000	2.956.275.200	1.664.065.200	1.338.858.935	2.968.338.648	2.723.571.971	1.302.934.450	1.295.578.750	94,5%	92,1%	78,3%	96,8%	-0,19	-18,78
3	Program Rehabilitasi Sosial	661.311.880	777.157.450	296.935.900	1.114.397.175	634.322.542	751.150.011	232.353.750	1.060.562.000	95,9%	96,7%	78,3%	95,2%	22,84	22,40
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.519.944.000	10.907.151.000	6.924.981.979	9.168.790.230	1.353.974.800	9.032.590.000	5.724.719.426	8.551.166.400	89,1%	82,8%	82,7%	93,3%	154,2	177,19
5	Program Penanganan Bencana	2.135.320.400	1.048.536.500	545.064.000	231.342.905	928.877.953	795.336.672	409.604.000	207.901.500	43,5%	75,9%	75,1%	89,9%	-29,72	-25,87
6	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	0	66.407.500	4.360.000	1.600.000	0	0	0	800.000	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,00	0,00
Total		13.071.802.885	21.653.205.580	15.473.273.373	17.223.133.924	11.122.672.696	19.026.041.721	13.328.679.253	16.162.640.111	85,1%	87,9%	86,1%	93,8%	16,14	10,59

Berdasarkan tabel 2.6 dapat diketahui bahwa capaian serapan anggaran tertinggi selama kurun waktu 2021-2024 yaitu pada tahun 2024 yaitu sebesar 93,8% sedangkan terendah pada tahun 2021 sebesar 85,1%. Sisa anggaran merupakan sisa kontrak pekerjaan, artinya meskipun capaian di bawah 100% namun target kinerja tetap terpenuhi. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program/kegiatan, integritas serta kualitas SDM yang tersedia sangat mendukung kinerja pengelolaan pendanaan. Pemanfaatan kemajuan teknologi juga mempermudah pencapaian kinerja namun juga perlu diselaraskan dengan kapasitas dan kualitas SDM pengelolanya.

Rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran Dinas Sosial meningkat sebesar 16,14%, ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah yang meningkat terhadap urusan kesejahteraan sosial serta pertumbuhan yang stabil menunjukkan bahwa kegiatan dinas dianggap strategis dan mendapatkan prioritas dalam penganggaran. Namun, hal tersebut adakalanya terjadi penurunan anggaran mengikuti dengan kondisi pemerintahan atau kebijakan nasional yang mempengaruhi anggaran di daerah pada tahun berjalan serta kondisi makro seperti wabah penyakit dan inflasi. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan alokasi realisasi Dinas Sosial sebesar 20,79% juga tergolong cukup optimal dan mengikuti tren pagu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rasio realisasi dan alokasi anggaran dikatakan baik diantaranya yaitu:

- 1) Perencanaan awal dan penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil survey di lapangan sudah sesuai dengan kebutuhan sehingga realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tepat sasaran;
- 2) Komitmen pimpinan dan pelaksana kegiatan sehingga program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang direncanakan;
- 3) Evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan serapan anggarannya dilakukan secara berkala; dan
- 4) Pelaksanaan rapat rutin antara pengelola keuangan dengan rencana kegiatan serta pelaksana kegiatan untuk membahas perubahan rencana kegiatan sehingga anggaran yang diperlukan berdasarkan adanya perubahan rencana kegiatan dapat segera disiapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan sosial terus berkembang dan semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sebagian besar di antaranya merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangat tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, di mana tujuan dari SPM tersebut adalah menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Pasca pandemi *Covid-19* dan terjadinya inflasi ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 yang menyebar di seluruh pelosok Indonesia tak terkecuali Kabupaten Blitar menyebabkan lemahnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kehidupan sosial ekobomi sehingga menyebabkan bertambahnya permasalahan sosial yang memerlukan penanganan serius dan menyeluruh dari seluruh stakeholder.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Sosial adalah:

- a. Kultur budaya masyarakat yang lebih mengandalkan bantuan langsung yang bersifat konsumsi daripada bantuan yang bersifat merangsang tumbuhnya usaha ekonomi produktif;
- b. Meningkatkan akses dan sarana prasarana pelayanan terhadap PPKS;
- c. Tuntutan kualitas pelayanan terhadap PPKS;
- d. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
- e. Sumber Daya Manusia (SDM) serta kualitas pelayanan guna memastikan ketersediaan jenis pelayanan dasar (hak dasar) pada SPM Sosial untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan penanganan bencana;
- f. Jumlah SDM di Dinas Sosial Kabupaten Blitar mengalami penurunan dari tahun ke tahun akibat purna tugas;
- g. Sebagai pelayanan wajib dasar pemerintah daerah anggaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar masih rendah;
- h. Peningkatan sarana prasarana shelter Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebagai wadah inklusif bagi penyandang disabilitas;
- i. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan memberikan dukungan dan daya ungkit pencapaian *Sustainable Development Goal's* (SDG;s) pada tujuan Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- j. Pengelolaan dengan mengoordinasikan serta penyediaan Data Kemiskinan Daerah sebagai rujukan penyusunan kebijakan pembangunan daerah khususnya bidang penanganan kemiskinan. Beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. Tingginya komitmen kepala daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan terhadap PPKS;
 - c. Adanya sinergitas program pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota dalam penanganan masalah sosial secara komprehensif;

- d. Peran serta dunia usaha yang melembaga dalam penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial;
- e. Sumber Daya Manusia (ASN) yang memiliki kualifikasi jabatan struktural, fungsional umum dan pranata pada Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Blitar yang masih memungkinkan optimalisasinya dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS;
- f. SDM pilar-pilar sosial di Kabupaten Blitar merupakan potensi untuk memecahkan masalah keterbatasan SDM pegawai ASN dan non ASN;
- g. Untuk optimalisasi kerja sama dengan Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mendukung sumber pendanaan yang berkaitan dengan pemenuhan SPM;
- h. Keterbatasan sarana prasarana shelter telah disikapi dengan penyediaan anggaran Rumah Latih untuk menjawab tuntutan dinamika persoalan di masyarakat dalam pelayanan kepada PPKS berspektif HAM;
- i. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suasana otonomi daerah menuntut terbangunnya kemitraan strategis dengan OPD lainnya, kecamatan, kelurahan/desa untuk memastikan negara hadir dalam menyelesaikan permasalahan sosial serta memastikan tidak ada golongan masyarakat atau PPKS yang tidak tertangani; dan
- j. Urusan sosial menjadi urusan wajib pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Blitar yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial.

Berbicara tentang masalah sosial tentu tidak bisa lepas dari permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang masih mewarnai Kabupaten Blitar, antara lain masih tingginya jumlah PPKS yang mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial ekonomi yang memerlukan dukungan serius dari pemerintah, kurangnya tingkat kemandirian fakir miskin karena kurangnya motivasi dan rasa percaya diri untuk merintis usaha serta kendala permodalan dan akses pemasaran hasil usaha, rendahnya minat masyarakat terutama pemuda menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terbatasnya tenaga fungsional pekerja sosial dan keterbatasan sarana prasarana pelayanan PPKS di Kabupaten Blitar. Selain itu, data kesejahteraan sosial tingkat daerah sangat perlu dimutakhirkan secara berkala untuk dapat diketahui tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar. Ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi yang berlangsung membawa dampak memburuknya perekonomian dan memengaruhi sulitnya upaya penurunan angka kemiskinan. Hal ini tentunya memerlukan upaya ekstra keras dari pemerintah untuk menangani masalah PPKS yang sangat kompleks baik dari segi perlindungan dan jaminan sosial, kebencanaan, rehabilitasi sosial, maupun pemberdayaan sosial.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya ketimpangan sosial masyarakat	Belum optimalnya upaya rehabilitasi dan pemberdayaan PPKS	Belum optimalnya rehabilitasi, pemberdayaan, dan cakupan jaminan sosial bagi PPKS
		Belum memiliki SOP penanganan PPKS secara terintegrasi lintas OPD
		Belum adanya rencana aksi penanggulangan PPKS (sesuai dengan kelompok PPKS)
		Belum adanya <i>pilot project</i> / duta berhasil PPKS sebagai pendorong motivasi PPKS
Sistem pendataan PPKS belum efektif dan belum berkelanjutan	Kualitas dan akurasi data PPKS belum memadai untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial	Proses verifikasi dan validasi (verivali) data tidak berjalan rutin dan menyeluruh
		Perlunya peningkatan jumlah dan kapasitas SDM pengelola data PPKS

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Perlunya peningkatan jumlah dan perluasan sumber anggaran untuk proses verifikasi dan validasi data PPKS
Belum terbangunnya sistem kolaboratif dan berdaya guna dalam pemberdayaan PSKS	Belum optimalnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kurangnya sinergitas antar PD dan terbatasnya jumlah relawan (PSKS) terkait program pendampingan wirausaha mandiri
PPKS tidak berkembang, tetap rentan, dan sulit keluar dari ketergantungan bantuan	Program pemberdayaan sosial bagi PPKS belum berjalan optimal dan berkelanjutan	Masih banyaknya PPKS yang tidak mandiri, tidak memiliki kepercayaan diri, dan membutuhkan dukungan serta motivasi berupa bimbingan sosial dan bimbingan kemandirian
		Belum optimalnya pembinaan PPKS terkait pengelolaan ekonomi keluarga
Sistem layanan dan jejaring penanganan PPKS di tingkat kabupaten belum optimal	PPKS tidak tertangani dengan cepat/tepat, meningkatnya kerentanan sosial di masyarakat	Penanganan PPKS di Kabupaten Blitar masih mengalami kendala rujukan ke panti sosial milik Provinsi apabila keterbatasan kuota penerimaan ataupun <i>overload</i>

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih periode 2025-2029.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kabupaten Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2025-2029 adalah “**KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA**”. Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar.

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar 2025-2029 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kabupaten Blitar 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas
- Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha
- Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat

- Misi 4 : Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Blitar mengemban Misi ke-2 yakni **“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha”**.

Dari Misi ke-2 di atas dijabarkan menjadi tujuan RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Daerah, yang dibentuk dari sasaran pembangunan :
 - a. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
 - b. Meningkatnya Kesempatan Kerja
 - c. Meningkatnya Efektivitas Investasi
 - d. Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah
2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur secara Komprehensif dan Berkelanjutan, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:
 - a. Meningkatnya Kuantitas & Kualitas Infrastruktur
 - b. Meningkatnya Kualitas LH

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan dari Misi ke-2 di atas, Dinas Sosial secara langsung terkait dengan tujuan kesatu yaitu **“Meningkatnya Kualitas Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Daerah”** dengan sasaran **“Menurunnya Tingkat Kemiskinan”** dan indikator **“Tingkat Kemiskinan”**.

Selain itu, Dinas Sosial juga terfokus pada Misi ke-4 Kepala Daerah yakni **“Menjamin Ketentraman, Ketertiban serta Kebebasan Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan”**. Dari Misi ke-4 dijabarkan menjadi tujuan pembangunan yaitu :

1. Terciptanya Suasana Kehidupan yang Aman dan Kondusif” dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban, dan Kebebasan Beragama
 - b. Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah

Berdasarkan tujuan dari Misi ke-4, Dinas Sosial terfokus pada tujuan tersebut dengan sasaran **“Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah”** dan indikator **“Indeks Risiko Bencana (IRB)”**.

Dengan adanya sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebagai penyelenggara pelayanan bidang sosial menitikberatkan pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana guna mencapai indikator sasaran tersebut. Pencapaian suatu indikator sasaran tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan penghambat yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial Kabupaten Blitar masih mengalami beberapa hambatan dan tentunya juga ada faktor pendorong tercapainya tujuan dan sasaran yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana	Peningkatan program bantuan sosial berbasis kemandirian, Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan Penyediaan pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan	a) Dana APBD terbatas untuk program-program pemberdayaan karena banyaknya belanja rutin b) Terbatasnya anggaran daerah khusus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak mampu maupun kelompok rentan c) Bantuan yang tersedia masih banyak yang bersifat jangka pendek, sebagian	a) Keberadaan relawan sosial, TKSK, PSM, Tagana dan Karang Taruna yang aktif di tingkat kecamatan b) Ketersediaan program bantuan dari Kementerian (PKH, BPNT, PBI, Atensi dll) c) Ketersediaan bantuan dari APBD Provinsi seperti KUBE dan Atensi d) Sinergi dengan UPT provinsi memungkinkan

		<p>besar bantuan sosial bersifat konsumtif dan temporer (misalnya: bantuan tunai, sembako, BLT), bukan transformatif</p> <p>d) Keterbatasan jumlah dan kualifikasi pendamping sosial, pekerja sosial maupun PSKS lain</p> <p>e) Budaya ketergantungan (charity mindset) masih kuat di sebagian masyarakat</p> <p>f) Masih kurangnya tingkat validitas atas dinamika data DTKS</p>	<p>pembagian peran dan beban anggaran yang lebih efisien (Sentra Terpadu, Balai Rehabsos maupun Panti Sosial) dalam hal penanganan PPKS</p>
<p>Misi 4 : Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan</p>	<p>Penguatan kebijakan perlindungan lingkungan dan Peningkatan kapasitas mitigasi bencana</p>	<p>a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana</p> <p>b) Belum terbentuknya KSB di seluruh daerah rawan bencana</p> <p>c) Wilayah pinggiran atau pegunungan (seperti selatan Blitar) minim akses ke logistik, sinyal komunikasi, atau tempat evakuasi layak</p>	<p>a) Ketersediaan relawan sosial terlatih (Tagana dan KSB)</p> <p>b) Tersedianya kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk siaga bencana melalui bimtek maupun sosialisasi mitigasi bencana melalui Kampung Siaga Bencana (KSB)</p> <p>c) Ketersediaan bufferstock logistik dan lumbung sosial di setiap KSB</p>

			d) Kerjasama dengan BPBD maupun sektor lain terkait untuk memperkuat upaya deteksi dini dan mitigasi risiko sosial
--	--	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar tidak bisa terlepas dari Renstra Kementerian Sosial karena tujuan nasional pembangunan bidang sosial dapat terwujud apabila didukung oleh tiap-tiap kabupaten/kota. Sesuai Rencana Strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2025-2029 telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Dinas Sosial Kabupaten Blitar selaku Perangkat Daerah yang mampu urusan sosial mengacu kepada kebijakan Kementerian Sosial RI dalam menentukan kebijakan di daerah. Visi Kementerian Sosial adalah “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yangmana selaras dengan Visi Presiden RI yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yang menekankan pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat. Dari visi tersebut diharapkan Kementerian Sosial mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional ke-6 berdasarkan RPJMN 2025-2029 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2025-2029, dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Presiden 2025-2029. Kementerian Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke 4 dan misi ke 6, dua misi yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia, pemerataan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Sasaran strategis dan indikator sasaran Renstra Kementerian Sosial RI periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Kementerian Sosial**

Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif, dengan indikator strategis “Indeks Kesejahteraan Sosial”	<p>a) Ketergantungan masyarakat terhadap bansos konsumtif (belum memicu kemandirian)</p> <p>b) Terbatasnya sarana pemulihan sosial untuk kelompok rentan (lansia, ODGJ, disabilitas dll)</p> <p>c) Alokasi anggaran masih dominan ke bansos, bukan pemberdayaan sehingga bersifat tidak berkelanjutan</p> <p>d) Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masih rendah</p> <p>e) Terbatasnya sarana dan prasarana Tagana dalam hal penanganan bencana</p> <p>f) Masih kurangnya pelatihan mitigasi bencana sosial bagi KSB yang sudah terbentuk</p> <p>g) Belum seluruh daerah rawan bencana terbentuk KSB</p>	<p>a) Tersedianya program bantuan sosial dari pusat maupun provinsi misal : Atensi, KUBE, Putri Jawara, KPM Jawara, PKH, BPNT, PBI dll</p> <p>b) Peran aktif pendamping sosial, TKSK dan lembaga kesejahteraan sosial</p> <p>c) Adanya regulasi dan SOP pelayanan sosial yang mulai tertata</p> <p>d) Dukungan program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok (KUBE)</p> <p>e) Tersedianya personil Tagana dan Kampung Siaga Bencana (KSB)</p> <p>f) Adanya peran aktif relawan sosial dalam hal menghadapi bencana, sehingga menjadikan kelembagaan lebih tanggap</p>

<p>Meningkatnya tata kelola kesejahteraan sosial yang berdampak, dengan indikator strategis “Indeks Reformasi Birokrasi”</p>	<p>a) Data masyarakat miskin dan PPKS belum valid dan terkini b) Jumlah SDM Dinas Sosial tidak sebanding dengan beban kerja dan jumlah PPKS, mengingat banyaknya pegawai yang purna tugas dan relawan sosial yang keluar dari kelembagaan c) Banyak tenaga fungsional sosial dan PSKS lain yang belum bersertifikasi d) Belum diterapkannya fasilitas pelayanan langsung di tingkat kecamatan/desa</p>	<p>a) Adanya sinergi dengan OPD lain, dimana Dinas Sosial berperan dalam pendataan masyarakat miskin dan rentan agar data tersebut dapat digunakan oleh perangkat daerah lain dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial b) Dukungan dari Pemprov Jatim dan Kemensos melalui UPT (Sentra Terpadu, Balai Rehabsos, Panti Sosial) c) Dinsos Kabupaten Blitar sudah memiliki beberapa kemitraan dengan LKS dan pendamping sosial d) Tersedianya shelter untuk penampungan sementara klien PPKS dengan kondisi terlantar</p>
--	---	---

Sementara itu, arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 memiliki Sasaran Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju, dengan rincian target pertumbuhan ekonomi 5,3% (2025) dan menuju 8% (2029), GNI

per kapita 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029), kontribusi PDB maritim 8,1% (2025) dan 9,1% (2029), dan kontribusi PDB manufaktur 20,8% (2025) dan 21,9% (2029);

2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, dengan rincian target peringkat *Global Power Index* 33 di tahun 2025 dan 29 pada tahun 2029.
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan rincian target tingkat kemiskinan 4,5-5,0%, indeks rasio gini 0,372-0,375%, dan kontribusi PDRB KTI 22,4%;
4. Daya saing Sumber Daya Manusia meningkat, dengan rincian target Indeks Modal Manusia (IMM) 0,56 (2025) dan 0,59 (2029); dan
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dengan rincian target penurunan intensitas emisi GRK 35,53% (2025) dan 45,17% (2029) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 76,49 (2025) dan 77,20 (2029).

Pada tahun 2025, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Analisis ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar terhadap sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2025-2029 disusun untuk mendukung visi Provinsi Jawa Timur yaitu “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam mendukung visi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berfokus pada misi (Nawa Bhakti Satya) ke 1 yaitu “**Jatim Sejahtera**” (Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas Sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu). Untuk mendukung Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menetapkan sasaran strategis

tahun 2025-2029 “Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”. Fungsi Sosial secara lebih lanjut dijelaskan pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Sasaran strategis "Meningkatnya Kesejahteraan PPKS" pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan turunan logis dari kebijakan strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang menempatkan kelompok rentan sebagai subjek utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya dimaknai sebagai distribusi bantuan sosial, tetapi juga sebagai transformasi sosial melalui pemberdayaan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial secara komprehensif. Dukungan kebijakan provinsi berupa program bantuan keuangan (APBD I), bantuan ATENSI, dan fasilitasi UPT rehabilitasi sosial memperkuat kapasitas daerah dalam mencapai sasaran tersebut.

Dengan demikian, terdapat kesinambungan vertikal antara kebijakan provinsi dan kabupaten yang memperkuat pencapaian sasaran strategis di Kabupaten Blitar, baik dalam aspek kebijakan, dukungan anggaran, maupun penguatan kelembagaan.

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya Fungsi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	a) Bantuan bersifat jangka pendek b) Data PPKS tidak selalu akurat/mutakhir c) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi sosial d) Ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial e) Rendahnya literasi	a) Tersedianya dukungan bantuan sosial dari provinsi (ATENSI, KPM Jawara/Putri Jawara, dan lainnya) b) Kerja sama dengan UPT rehabilitasi sosial provinsi c) Tersedianya DTKS & pemutakhiran secara digital d) Pelatihan

	sosial dan ekonomi kelompok rentan f) Keterbatasan SDM fasilitator di tingkat desa g) Bencana bersifat tidak terduga dan multidimensi (sosial, alam, kesehatan) h) Masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi	keterampilan dari program provinsi dan pusat e) Adanya KSB (Kampung Siaga Bencana) dan pemberdayaan Tagana f) Peran serta lembaga kemasyarakatan dan relawan sosial g) Adanya pelatihan dan simulasi dari provinsi untuk Tagana/KSB h) Dukungan logistik bencana dari provinsi & pusat
--	---	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan dari Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai **Kawasan Agroindustri dan Pariwisata** yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Blitar meliputi:

- a. Pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang;
- b. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
- c. Pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar;
- d. Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial;

- e. Pengembangan sistem transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah;
- f. Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;
- g. Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
- h. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana;
- i. Pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan;
- j. Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di kabupaten;
- k. Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;
- l. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- m. Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan
- n. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di wilayah Kabupaten Blitar, di antaranya yaitu potensi sektor pertanian yang cukup luas sehingga mampu menghasilkan produksi berbagai produk tanaman dan pangan guna menyokong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pariwisata di Kabupaten Blitar juga tergolong banyak, yang ditunjang oleh destinasi wisata alam baik pegunungan maupun pesisir pantai. Oleh karena itu, Kabupaten Blitar terus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut agar dapat terus berkembang dan berkelanjutan.

Memperhatikan tujuan penataan ruang Kabupaten Blitar dan penjelasannya di atas, maka sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait kesejahteraan sosial maka akan berusaha meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan para PPKS dan korban bencana dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan berinteraksi sosial dan keberfungsian sosial secara lebih optimal

sehingga mereka mampu mengatasi berbagai persoalan sosial dan mewujudkan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial secara profesional dan humanis.

Selanjutnya mengenai kawasan di Kabupaten Blitar, pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031, pola ruang untuk kawasan lindung meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam;
- f. Kawasan cagar geologi; dan
- g. Kawasan lindung lainnya.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Blitar terbagi menjadi kawasan rawan bencana longsor, kawasan rawan bencana banjir, dan kawasan rawan bencana lainnya. Kawasan rawan bencana longsor meliputi wilayah Blitar berada di wilayah pegunungan dan perbukitan seperti di Kecamatan Bakung, Panggungrejo, Wates, Binangun, Kademangan, Kesamben, Selorejo, Doko, Gandusari, dan Wlingi. Kawasan rawan bencana banjir yaitu berada di kawasan sekitar DAS Brantas yang meliputi Kecamatan Udanawu, Wonotirto, Sutojayan, Panggungrejo, Binangun, Kademangan, Wonodadi, Wlingi, Talun, Selopuro, dan Kesamben. Sementara untuk kawasan rawan bencana alam lainnya berupa:

- a. kawasan rawan bahaya angin puyuh/angin puting beliung terdapat di seluruh kecamatan;
- b. kawasan rawan bahaya kekeringan meliputi Kecamatan Nglegok, Bakung, Wonotirto, Kademangan, Panggungrejo, Wates, dan Binangun;
- c. bencana alam yang biasanya berhubungan dengan wilayah yang terdapat tambang/galian tipe C meliputi Kecamatan Nglegok, Gandusari, Bakung, Wates, Wlingi, Wonotirto, Panggungrejo, dan Kademangan;
- d. kawasan rawan bencana sosial yang berhubungan dengan daerah yang berpotensi rawan konflik. Hal ini sering berkaitan dengan

perebutan lahan, perkebunan, area tambang, dan sebagainya, di mana daerah-daerah tersebut antara lain di Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Gandusari, Kademangan, dan Nglekok.

Mengacu pada Perda tata ruang, khususnya yang menyangkut penanganan bencana, maka sasaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah penanggulangan bencana informal yaitu unsur penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Agar potensi penanggulangan bencana berfungsi secara optimal diperlukan proses pembelajaran agar lebih andal.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya pelatihan dan pendidikan yang terorganisir, terukur dan sistematis. Tanpa pendidikan dan pelatihan maka dipastikan tidak terciptanya masyarakat yang andal dalam penanganan bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana yang akan datang. Proses terbentuknya TAGANA sebagai potensi penanganan bencana berbasis masyarakat yang terlatih, maka salah satu pedoman pelatihan untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah pelatihan yakni TAGANA terlatih.

Selain itu, peran terbentuknya KSB atau (Kampung Siaga Bencana) menjadi sarana yang dapat berfungsi sebagai penanggulangan bencana khususnya di daerah rawan bencana. Berawal di tahun 2021-2024 terbentuk sejumlah 10 (sepuluh) KSB, diantaranya:

- a. KSB Ngambak Bahari : Desa Tambakrejo dan Ngadipuro Kecamatan Wonotirto;
- b. KSB Serang Shakti : Desa Serang dan Summersih Kecamatan Panggungrejo;
- c. KSB Tanggap Lekso : Desa Ngadirenggo dan Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi;
- d. KSB Jolosutro Manunggal : Desa Ringinrejo dan Tugurejo Kecamatan Wates;
- e. KSB Bima Bahari : Desa Bululawang Kecamatan Bakung;
- f. KSB Argo Pegat : Desa Kebonduren, Desa Pongkok, Desa Bacem dan Desa Langon Kecamatan Pongkok;
- g. KSB Kali Bogel : Desa Bacem, Kelurahan Sutojayan, Kelurahan Kalipang dan Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan;
- h. KSB Lembu Suro : Kelurahan Tawang Sari, Desa Karangrejo, Desa Sidodadi dan Desa Slorok Kecamatan Garum;

- i. KSB Lereng Kelud : Kelurahan Nglekok, Desa Penataran, Desa Kedawung, Desa Sumberasri dan Desa Modangan Kecamatan Nglekok; dan
- j. KSB Lereng Timur Siaga : Desa Semen dan Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari.

Tabel 3.5

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031

No	Visi RTRW	Misi RTRW	Arah Pemanfaatan Ruang	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat	Mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten Blitar disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah	Penyaluran program kesejahteraan seperti bantuan sosial, rehabilitasi, dan penyuluhan dijalankan juga di tingkat desa dan kelurahan non-urban, mendekatkan akses pelayanan ke komunitas yang terdampak	Pusat konsentrasi pelayanan masih di kecamatan pusat, menciptakan beban administratif dan logistik tinggi bagi masyarakat di wilayah pinggiran	Keterbatasan anggaran lokal untuk membiayai petugas keliling, sewa ruang pertemuan, dan fasilitas pendukung.	SDM Dinsos didukung aplikasi SIDAKSOS untuk pendataan terutama pada lapisan masyarakat miskin dan rentan serta tersedianya kanal pengaduan publik, meningkatkan kecepatan respon terhadap masalah sosial.
2.		Mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang	Distribusi lokasi pelatihan dan intervensi ekonomi sosial difokuskan ke wilayah-wilayah	Kurangnya keberlanjutan pendampingan pasca-bantuan (modal atau pelatihan)	Koordinasi lintas sektor belum optimal (misal, dengan Dinas Koperasi atau Dinas Tenaga Kerja)	Potensi potensi lokal Blitar seperti sektor peternakan, pertanian hortikultura, dan

		didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi;	dengan potensi lokal (pertanian, peternakan, kerajinan, wisata)			kerajinan (batik, bordir) dapat disinergikan dengan program sosial
3.		Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan wilayah	Penyediaan fasilitas layanan sosial seperti rumah singgah, tempat pelayanan ODGJ, penyandang disabilitas, lansia, dll. di wilayah terpencil maupun berkembang	Masih terbatasnya sarana pelayanan sosial (Panti, Shelter, LKS) di daerah khususnya untuk penyandang disabilitas	Anggaran pembangunan masih fokus infrastruktur umum, bukan infrastruktur sosial Rendahnya partisipasi LKS lokal	Adanya fasilitasi dari pemerintah daerah bantuan hibah untuk lembaga sosial

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan dan didukung kehadiran *good governance*. Dalam konteks implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, KLHS telah memberikan arah kebijakan dalam penanganan PPKS yang integratif dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan, dan memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosial PPKS.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 tidak terlepas dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029. Dalam KLHS tersebut dijelaskan isu strategis bidang sosial di Kabupaten Blitar merupakan kondisi sosial yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan sehingga kondisi sosial di Kabupaten Blitar dapat menjadi lebih baik. Isu strategis di bidang sosial terdiri dari masalah kemiskinan, penurunan nilai sosial dan kebangsaan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan serta tingkat kesehatan masyarakat yang menurun. Kondisi tersebut yang masih harus dikedepankan dan diperhatikan mengenai pembangunan di bidang sosial Kabupaten Blitar pada tahun 2025-2029.

Salah satu isu pembangunan di bidang sosial adalah tentang kemiskinan yang merupakan salah satu dari *long list* atau daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar tahun 2023 berjumlah 101.940 jiwa atau dengan persentase sebesar 8,69% dari total penduduk Kabupaten Blitar secara keseluruhan. Jumlah penduduk miskin tahun 2022 juga pada angka yang sama yakni 101.940 jiwa, akan tetapi persentase kemiskinannya sebesar 8,71%. Hal ini mengartikan bahwa terdapat pertambahan penduduk di Kabupaten Blitar dengan status ekonomi dengan kategori mampu atau tidak miskin. Tujuan pembangunan berkelanjutan di antaranya mengentaskan segala bentuk kemiskinan dengan mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai

dengan definisi nasional serta menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin melalui Program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penanganan Bencana.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar dilakukan melalui kajian komprehensif terhadap berbagai permasalahan mendasar yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Isu strategis tersebut mencakup beberapa aspek penting yang menjadi kendala dalam memberikan pelayanan optimal kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pertama, belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial bagi PPKS menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Selanjutnya, bantuan tanggap darurat bencana juga belum berjalan secara optimal, sehingga penanganan dampak bencana sosial dan alam masih belum memadai.

Di samping itu data perkembangan jumlah Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Blitar selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan, baik dari segi jumlah absolut maupun persentase terhadap total populasi. Pada tahun 2021, jumlah PMKS tercatat sebanyak 571.343 orang dengan persentase 44,62%. Pada tahun berikutnya, terjadi penurunan menjadi 485.566 orang atau 39,68%. Penurunan yang lebih drastis terlihat pada tahun 2023 dan 2024, dengan jumlah PMKS masing-masing sebesar 110.288 (9,19%) dan 110.692 (8,76%). Meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan, angka PMKS yang masih mencapai lebih dari 100 ribu pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa tantangan dalam penanganan kesejahteraan sosial masih besar dan memerlukan perhatian khusus.

Selain itu, pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penanganan PPKS belum dimanfaatkan secara maksimal, yang berkontribusi pada kurang efektifnya program pemberdayaan sosial. Permasalahan data juga menjadi isu penting, dimana pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data sektoral melalui aplikasi

SIDAKSOS belum berjalan maksimal, sehingga kualitas perencanaan dan monitoring program kesejahteraan sosial menjadi kurang akurat. Belum mutakhirnya data PPKS dan PSKS serta ketidakpastian jumlah PPKS yang bersifat dinamis dan insidental menambah kompleksitas dalam penanganan sosial.

Selain aspek teknis, nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat juga masih perlu diperkuat sebagai modal sosial untuk mendukung keberhasilan program kesejahteraan. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah keterbatasan sarana dan prasarana, serta jumlah sumber daya manusia atau aparatur di Dinas Sosial yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial yang semakin kompleks. Lebih jauh, penanggulangan bencana alam dan sosial belum optimal, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan koordinasi lintas sektor.

Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih cukup tinggi;
2. Belum optimalnya rehabilitasi sosial dasar PPKS dan keterpaduan penanganan PPKS antar pemerintahan dan antar sektor;
3. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Belum maksimalnya pengelolaan Data Kemiskinan Daerah (DKD) sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PPKS lainnya;
5. Belum maksimalnya penanganan PPKS yang terlantar;
6. Masih kurang optimalnya kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi Kepala Daerah Kabupaten Blitar periode 2025-2029, yakni “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”, menjadi landasan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Dinas Sosial berkontribusi secara langsung dalam mendukung pencapaian visi tersebut melalui dua misi strategis, yaitu misi kedua yang fokus pada pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang berwawasan lingkungan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia usaha, dan misi keempat yang menitikberatkan pada ketentraman, ketertiban, ketangguhan bencana, serta kebebasan beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks misi kedua, Dinas Sosial menghadapi berbagai isu strategis seperti belum optimalnya pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini berimplikasi pada rendahnya pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) serta belum maksimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui aplikasi SIDAKSOS. Kondisi tersebut menjadi hambatan bagi optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, mendukung misi keempat, Dinas Sosial menghadapi tantangan dalam hal penanggulangan bencana alam dan sosial yang belum optimal, keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia, serta tingginya angka PPKS yang bersifat dinamis dan insidental. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kerentanan sosial dan ketidakterjaminan ketentraman masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari isu strategis tersebut, Dinas Sosial merumuskan tujuan jangka menengah lima tahunan yaitu **Menurunnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**. Penurunan angka PPKS ini tidak hanya menitikberatkan pada penanganan yang cepat dan tepat, tetapi juga pada upaya pemberdayaan yang berkelanjutan sehingga PPKS dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dan memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran utama, yaitu:

1. **Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, yang diukur melalui persentase PPKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya.
2. **Meningkatnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah**, diukur dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengukuran ketercapaian sasaran ke-1 yaitu kesejahteraan PPKS dilakukan secara kuantitatif melalui rumus perhitungan berikut:

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya}}{\text{Jumlah PPKS yang Ada}} \times 100\%$$

Untuk memastikan data yang akurat dan relevan, diperlukan pemutakhiran data PPKS secara berkala setiap tahun serta pemantauan perkembangan melalui program pelayanan sosial yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Data historis jumlah PMKS di Kabupaten Blitar yang menunjukkan penurunan signifikan dari 571.343 orang (44,62%) pada tahun 2021 menjadi sekitar 110.692 orang (8,76%) pada tahun 2024 mengindikasikan adanya kemajuan, namun tetap menegaskan perlunya upaya yang lebih intensif dalam penanganan PPKS agar dapat menurunkan angka kerentanan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Blitar beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Blitar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Penurunan Jumlah PPKS	-	0,37%	0,15%	0,17%	0,19%	0,21%	0,23%	0,25%	0,25%	
	1	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya	-	74,29%	74,32%	74,34%	74,36%	74,38%	74,40%	74,40%
	2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2	Nilai SAKIP	67,82	60,15	60,15	60,50	60,85	61,20	61,55	61,90

Kondisi awal periode Renstra PD Tahun 2023 untuk capaian Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran ke-1 tidak terisi karena adanya perubahan IKU, definisi operasional dan rumus pengukuran capaian indikator. Dimana Tahun 2023 Indikator Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Blitar yaitu “Persentase Penurunan Angka PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)”, akan tetapi capaian pada tahun tersebut terdapat gap yang terlalu jauh dengan Tahun 2024. Rumus Pengukuran “Persentase Penurunan Angka PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” Tahun 2023 sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah PPKS (n-1)} - \text{Jumlah PPKS (n)}}{\text{Jumlah PPKS (n-1)}} \times 100\%$$

Sedangkan indikator tujuan tersebut tahun 2024 diubah menjadi “Persentase Penurunan Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)” dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah PPKS (n)} - \text{Jumlah PPKS (n-1)}}{\text{Jumlah PPKS (n-1)}} \times 100\%$$

Rumus pengukuran indikator yang menjadi IKU Dinas Sosial tersebut diubah karena apabila dilihat dari persentase PPKS, dari tahun ke tahun terlihat menurun, akan tetapi dilihat dari sudut pandang jumlah PPKS, capaian terlihat meningkat dibandingkan menurun. Indikator tersebut seolah-olah bernilai positif ketika angkanya naik, namun karena basisnya adalah kelompok miskin dan rentan, maka kenaikan angka juga bisa diartikan sebagai jumlah kelompok miskin dan rentan yang tinggi/bertambah, yang seharusnya negatif dalam konteks tujuan pembangunan. Akan tetapi, pertumbuhan angka PPKS tentunya dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, yang mana proyeksi pertumbuhan penduduk di Indonesia menurut BPS cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, target indikator ditetapkan bersifat positif karena kinerja pelayanan, dimana mengukur seberapa jauh/besar kelompok sasaran rentan atau PPKS terjangkau oleh layanan maupun program. Target tahunan juga ditentukan naik setiap tahun, bukan berarti kemiskinan semakin bertambah, tetapi karena perluasan cakupan program, perbaikan sistem layanan dan target tahunan disusun berdasarkan proyeksi realisasi capaian, bukan tren kemiskinan.

Selain indikator tujuan yang berubah, indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar juga turut diubah, dimana tahun 2023 adalah “Persentase PPKS yang Tertangani” dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Tertangani pada tahun (n)}}{\text{Jumlah PPKS yang Seharusnya Tertangani pada tahun (n)}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 indikator sasaran diubah, agar dapat dijadikan data *baseline* dasar penyusunan target pada Renstra 2025-2029. Indikator sasaran tersebut diubah menjadi “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya”. Indikator sasaran sebelumnya fokus pada **tertanganinya kasus**, artinya pelayanan hanya mengukur apakah PPKS sudah menerima bantuan, indikator perubahan berbasis **hasil (outcome)**, yaitu apakah setelah menerima layanan, PPKS benar-benar **mampu menjalani fungsi sosialnya dan kebutuhan dasarnya terpenuhi**.

Dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan Dinas Sosial Kabupaten Blitar yang dimaksud di atas, adapun jenis-jenis PPKS berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 antara lain:

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking

19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 disebutkan bahwa urusan pemerintah konkuren terbagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar, salah satunya adalah bidang sosial. Pada lampiran UU ini dijelaskan bahwa kewenangan kabupaten/kota dalam bidang sosial terbatas pada jenis pelayanan dasar yang sesuai dengan kemampuan daerah, seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia terlantar, fakir miskin dan korban bencana alam maupun sosial. Artinya, kabupaten/kota tidak diwajibkan menangani semua jenis PPKS.

Dari 26 jenis PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang tercantum dalam Permensos, tidak semuanya secara langsung ditangani oleh Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- Beberapa jenis PPKS merupakan **kewenangan provinsi atau pusat**, contohnya:
 - Orang dengan HIV/AIDS → layanan utama di Dinas Kesehatan
 - Korban Penyalahgunaan NAPZA → rehabilitasi oleh pemerintah pusat
 - Komunitas Adat Terpencil → kebijakan dan layanan utamanya dari Kementerian Sosial/Pusat
 - Korban Trafficking → ditangani oleh UPTD PPA (provinsi)
- Dinas Sosial kabupaten/kota biasanya **fokus** pada jenis PPKS yang memiliki **program nyata, anggaran, dan petugas lapangan**, seperti anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, fakir miskin, korban bencana, ODGJ terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, anak berhadapan dengan hukum.
- Beberapa jenis PPKS ditangani secara **multi-stakeholder**, sehingga peran Dinas Sosial **bersifat koordinatif**, bukan pelaksana langsung.

- Contoh: korban kekerasan perempuan dan anak → dikoordinasikan dengan UPTD PPA, kepolisian, dan psikolog.

Berikut ini adalah daftar jenis PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang dilayani oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar, disesuaikan dengan **tugas dan fungsi kewenangan kabupaten/kota**, serta program/sub kegiatan yang umumnya dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar:

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
5. Lanjut Usia Terlantar
6. Penyandang Disabilitas
7. Gelandangan
8. Pengemis
9. Korban Bencana Alam
10. Korban Bencana Sosial
11. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
12. Fakir Miskin
13. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan “Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” serta dua sasaran utama Dinas Sosial Kabupaten Blitar, yaitu **(1) Meningkatnya kesejahteraan PPKS**, dan **(2) Meningkatnya efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah**, diperlukan perumusan strategi dan kebijakan yang tepat, terarah, dan berkelanjutan. Strategi dan kebijakan ini dirumuskan dengan memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT, yang menggambarkan posisi strategis Dinas Sosial dalam menghadapi tantangan pembangunan sosial lima tahun ke depan.

1. Kekuatan (*Strengths*):

- Komitmen kelembagaan dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial.
- Tersedianya aplikasi SIDAKSOS sebagai instrumen pengelolaan data sosial.
- Terbentuknya jaringan kerja sama dengan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial).
- Kecenderungan tercapainya penurunan persentase PPKS sesuai target dalam tiga tahun terakhir.

2. Kelemahan (*Weaknesses*):

- Kualitas dan akurasi data PPKS yang belum optimal.
- Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur di bidang sosial.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan sosial.
- Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital untuk pemantauan hasil pemberdayaan.

3. Peluang (*Opportunities*):

- Dukungan visi-misi kepala daerah yang menekankan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
- Potensi sinergi program dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat (CSR dan PSKS).
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu kesejahteraan sosial dan inklusi.
- Arah kebijakan nasional yang mendukung reformasi perlindungan sosial.

4. Ancaman (*Threats*):

- Dinamisnya jumlah PPKS yang sulit diprediksi secara tahunan.
- Risiko terjadinya bencana sosial dan alam yang memperluas kerentanan sosial.
- Ketimpangan distribusi intervensi sosial antar kecamatan.
- Minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar berdasarkan hasil analisis SWOT, ditetapkan beberapa strategi utama berikut ini:

1. Strategi 1 : Penguatan Sistem Data Sosial dan Pemantauan Keberfungsian Sosial PPKS

Kebijakan :

- Optimalisasi verifikasi dan validasi (verivali) data PPKS berbasis digital
- Peningkatan kapasitas SDM dalam pemutakhiran data berbasis aplikasi

Terkait dengan Sasaran :

- Sasaran 1: Meningkatkan kesejahteraan PPKS.
- Sasaran 2: Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

2. Strategi 2 : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta Kelembagaan Sosial

Kebijakan :

- Meningkatkan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti TKSK, Karang Taruna, Tagana, LKS
- Penguatan sinergi lintas perangkat daerah dan lembaga vertikal dalam pelayanan sosial

Terkait dengan Sasaran : Gabungan sasaran 1 dan 2, melalui peningkatan kualitas layanan dan pemberdayaan sosial berbasis masyarakat.

3. Strategi 3 : Optimalisasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Berkelanjutan bagi PPKS

Kebijakan :

- Penyediaan akses layanan dasar (pangan, kesehatan, pendidikan) bagi kelompok rentan

- Pemberdayaan PPKS melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan akses permodalan

Terkait dengan Sasaran :

- Sasaran 1 : Meningkatnya kesejahteraan PPKS

4. Strategi 4 : Penguatan Ketangguhan Sosial dalam Penanggulangan Bencana Sosial dan Alam

Kebijakan :

- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM tanggap bencana (Tagana, KSB dan Pordam)
- Penguatan edukasi masyarakat rentan tentang ketangguhan sosial pascabencana melalui sosialisasi.
- Menyediakan *buffer stock* logistik sosial, dukungan psikososial dan shelter darurat yang responsif terhadap kelompok rentan.
- Membangun kemitraan strategis dengan BPBD, PMI, TNI/Polri, Dinkes, lembaga keagamaan, dan ormas
- Menyusun SOP penanganan PPKS terdampak bencana

Terkait dengan Sasaran :

- Gabungan sasaran 1 dan 2, terutama dalam menjamin ketenteraman dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Misi 1)

VISI (RPJMD)	:	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya		
MISI (RPJMD)	:	Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan		1. Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan	Penguatan Sistem Data Sosial dan Pemantauan	Optimalisasi verifikasi dan validasi data PPKS berbasis digital

Sosial (PPKS)	Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Keberfungsian Sosial PPKS	Peningkatan kapasitas SDM dalam pemutakhiran data berbasis aplikasi
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta Kelembagaan Sosial	Meningkatkan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti TKSK, Karang Taruna, Tagana, LKS
	1. Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Optimalisasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Berkelanjutan bagi PPKS
		Penyediaan akses layanan dasar (pangan, kesehatan, pendidikan) bagi kelompok rentan	
			Pemberdayaan PPKS melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan akses permodalan

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Misi 2)

VISI (RPJMD)	:	Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya		
MISI (RPJMD)	:	Misi 4 : Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penguatan Ketangguhan Sosial dalam Penanggulangan Bencana Sosial dan Alam	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM tanggap bencana (Tagana, KSB dan Pordam)
				Penguatan edukasi masyarakat rentan tentang ketangguhan sosial pascabencana melalui sosialisasi
				Menyediakan <i>buffer stock</i> logistik sosial, LDP dan shelter darurat yang responsif terhadap kelompok rentan
				Membangun kemitraan strategis dengan BPBD, PMI, TNI/Polri, Dinkes, lembaga keagamaan, dan ormas
				Menyusun SOP penanganan PPKS terdampak bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas layanan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berikut disajikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2025-2029. Masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan telah dilengkapi dengan sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumber daya yang tersedia setiap tahunnya. Keselarasan mulai dari tujuan sampai dengan sub kegiatan berikut target kinerja dan pendanaannya disajikan secara lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampuhan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Nilai SAKIP			Baik (B) 60,15	Baik (B) 60,15	4.762.830.564	Baik (B) 60,50	6.154.240.908	Baik (B) 60,85	6.341.551.550	Baik (B) 61,20	6.510.490.438	Baik (B) 61,55	6.678.688.000	Baik (B) 61,90	6.852.824.000	Baik (B) 62,15	32.537.794.896	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	Nilai Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	n/A	80%	4.762.830.564	Baik (B) 82,89 %	6.154.240.908	Baik (B) 83,29 %	6.341.551.550	Baik (B) 83,69 %	6.510.490.438	Baik (B) 84,09 %	6.678.688.000	Baik (B) 84,49 %	6.852.824.000	Baik (B) 84,49 %	32.537.794.896	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	Akumulasi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun/dilakukan	9 Dokumen	9 Dokumen	1.549.900	9 Dokumen	2.148.000	9 Dokumen	2.211.000	9 Dokumen	2.273.000	9 Dokumen	2.336.000	9 Dokumen	2.402.000	9 Dokumen	11.370.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampunan Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun pada Tahun Berjalan	3 dokumen	3 dokumen	774.900	3 dokumen	1.029.000	3 dokumen	1.059.000	3 dokumen	1.089.000	3 dokumen	1.119.000	3 dokumen	1.151.000	3 dokumen	5.447.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun pada Tahun Berjalan	6 laporan	6 laporan	775.000	6 laporan	1.119.000	6 laporan	1.152.000	6 laporan	1.184.000	6 laporan	1.217.000	6 laporan	1.251.000	6 laporan	5.923.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlayani Sesuai Standar ----- x 100 % Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Harus Dilayani	100%	100%	3.614.396.243	100%	3.784.586.000	100%	4.122.561.000	100%	4.239.237.000	100%	4.355.913.000	100%	4.479.194.000	100%	20.981.491.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang/bulan	30 Orang	3.580.560.243	38 Orang	3.744.796.000	38 Orang	4.081.977.000	38 Orang	4.197.505.000	38 Orang	4.313.032.000	38 Orang	4.435.100.000	38 Orang	20.772.410.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baselin e Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pera ngkat Daerah Peng amp u Urusan	Lokas i
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 dokumen	6 dokumen	33.836.000	6 dokumen	39.790.000	6 dokumen	40.584.000	6 dokumen	41.732.000	6 dokumen	42.881.000	6 dokumen	44.094.000	6 dokumen	209.081.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standar	%	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlayani Sesuai Standar ----- ----- x 100% Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Harus Dilayani	n/A	-	-	100%	154.250.000	100%	158.500.000	100%	162.750.000	100%	164.000.000	100%	168.250.000	100%	807.750.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/A	-	-	26 Orang	52.250.000	26 Orang	54.500.000	26 Orang	56.750.000	26 Orang	56.000.000	26 Orang	58.250.000	26 Orang	277.750.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampunan Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n/A	-	-	40 Orang	102.000.000	40 Orang	104.000.000	40 Orang	106.000.000	40 Orang	108.000.000	40 Orang	110.000.000	40 Orang	530.000.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia Sesuai Standar ----- ----- x 100% Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Harus Disediakan	100%	100%	368.330.321	100%	691.432.938	100%	753.985.000	100%	759.467.300	100%	768.217.000	100%	771.809.000	100%	4.113.241.559	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	54.505.900	12 paket	67.350.000	12 paket	81.113.000	12 paket	83.409.000	12 paket	85.704.000	12 paket	88.130.000	12 paket	405.706.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	11.175.700	12 paket	17.225.000	12 paket	18.485.000	12 paket	19.646.000	12 paket	24.810.000	12 paket	25.513.000	12 paket	105.679.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampunan Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	15.090.000	2 paket	15.542.700	2 paket	16.012.000	2 paket	16.412.300	2 paket	17.703.000	2 paket	18.166.000	2 paket	83.836.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.06.0004	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	6.915.000	12 laporan	7.684.000	12 laporan	8.375.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	46.059.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	48 laporan	246.893.721	48 laporan	482.243.350	48 laporan	555.000.000	48 laporan	555.000.000	48 laporan	555.000.000	48 laporan	555.000.000	48 laporan	2.702.243.350	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	33.750.000	12 dokumen	75.000.000	12 dokumen	75.000.000	12 dokumen	75.000.000	12 dokumen	75.000.000	12 dokumen	75.000.000	12 dokumen	375.000.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	77.261.600	50 Unit	433.366.024	50 Unit	216.368.000	50 Unit	222.323.000	50 Unit	228.616.000	50 Unit	230.432.000	50 Unit	1.331.105.024	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	77.261.600	50 unit	210.413.000	50 unit	216.368.000	50 unit	222.323.000	50 unit	228.616.000	50 unit	230.432.000	50 unit	1.108.152.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	Jasa	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	5 Jasa	5 Jasa	479.702.500	5 Jasa	535.530.000	5 Jasa	491.389.550	5 Jasa	503.994.138	5 Jasa	516.512.000	5 Jasa	524.860.000	5 Jasa	2.572.285.688	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550 laporan	550 laporan	3.999.600	550 laporan	4.000.000	550 laporan	5.565.000	550 laporan	5.722.000	550 laporan	5.880.000	550 laporan	6.045.000	550 laporan	27.212.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	71.002.500	3 laporan	72.422.550	3 laporan	73.772.550	3 laporan	74.879.138	3 laporan	75.256.000	3 laporan	76.320.000	3 laporan	372.650.238	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	15 Laporan	404.700.400	12 Laporan	408.150.000	12 Laporan	412.052.000	12 Laporan	423.393.000	12 Laporan	435.376.000	12 Laporan	442.495.000	12 Laporan	2.121.466.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	77 unit	77 unit	221.590.000	77 unit	552.927.946	77 unit	596.537.000	77 unit	620.446.000	77 unit	643.094.000	77 unit	675.877.000	77 unit	3.088.881.946	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampunan Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit	26 unit	152.900.000	26 unit	191.910.000	26 unit	269.069.000	26 unit	279.483.000	26 unit	289.928.000	26 unit	301.183.000	26 unit	1.331.573.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50 unit	43.190.000	50 unit	55.188.000	50 unit	59.871.000	50 unit	65.793.000	50 unit	70.422.000	50 unit	83.948.000	50 unit	335.222.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	25.500.000	1 unit	212.678.000	1 unit	267.597.000	1 unit	275.170.000	1 unit	282.744.000	1 unit	290.746.000	1 unit	1.328.935.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampunan Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat memenuhi kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya ----- x 100% Jumlah PPKS yang Ada PPKS adalah PPKS sesuai Permensos 8/2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS (diluar ODHA dan korban penyalahgunaan Napza)	%	Jumlah PPKS yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya	4,19%	4,25%	12.573.807.300	4,30%	9.160.878.900	4,36%	9.954.822.179	4,41%	10.132.062.293	4,46%	10.456.209.021	4,52%	10.606.403.830	4,52%	50.310.376.223	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	Jumlah SDM Kesos yang Mengikuti Pelatihan/Peningkatan Kapasitas x 100% Jumlah Total SDM Kesos yang ada	25,57 %	24,66 %	572.191.650	24,43 %	2.835.595.550	24,21 %	2.954.613.313	24,89 %	2.973.841.365	25,34 %	2.996.604.658	25,11 %	3.156.947.467	25,11 %	14.917.602.353	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pera ngkat Daerah Peng amp u Urusan	Lokas i
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin/Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang Diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah Izin/Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	4.533.000	1 Rekomendasi	5.103.000	1 Rekomendasi	5.574.000	1 Rekomendasi	5.824.000	1 Rekomendasi	6.074.000	1 Rekomendasi	6.324.000	1 Rekomendasi	28.899.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1 Dokumen	4.533.000	2 Dokumen	5.103.000	3 Dokumen	5.574.000	3 Dokumen	5.824.000	3 Dokumen	6.074.000	3 Dokumen	6.324.000	3 Dokumen	28.899.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampunan Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	%	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial ----- x 100% Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Target untuk Mengikuti Pemberdayaan Sosial	91%	100%	567.658.650	100%	2.775.619.550	100%	2.891.972.313	100%	2.909.238.365	100%	2.929.400.658	100%	3.087.965.467	100%	14.594.196.353	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lemba ga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	36 lembaga	36 lembaga	551.158.650	36 lembaga	2.342.127.350	38 lembaga	2.441.884.945	38 lembaga	2.438.470.778	38 lembaga	2.444.256.648	38 lembaga	2.590.331.577	38 lembaga	12.257.071.298	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pena ngkat Daer ah Peng amp u Urus an	Lokas i
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.02.2 .03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi dalam Penanganan Kasus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Penanganan Kasus Kewenangan Kabupaten/ Kota	8 orang	3 orang	16.500.000	3 orang	33.779.200	3 orang	35.130.368	3 orang	36.535.587	3 orang	37.997.010	3 orang	39.516.890	3 orang	182.959.055	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.02.2 .03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Jumlah PSKS perseorang yang memperoleh pelatihan/bimtek PSKS mencakup PSM, TKSK, Karang Taruna, pengurus LKS, anggota/pengurus LK3 maupun relawan sosial	n/A	-	-	72 orang	399.713.000	72 orang	414.957.000	72 orang	434.232.000	72 orang	447.147.000	72 orang	458.117.000	72 orang	2.154.166.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampuhan Urusan	Lokasi	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
						lainnya																		
		1.06.02.3.05	Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	Persentase LKS yang Terdata dan Terverifikasi	%	Jumlah LKS yang Berhasil Didata dan Diverifikasi ----- x 100% Jumlah LKS yang Menjadi Target Pendataan	100%	-	-	100%	54.873.000	100%	57.067.000	100%	58.779.000	100%	61.130.000	100%	62.658.000	100%	294.507.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar	
		1.06.02.3.05.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	36 lembaga	-	-	36 lembaga	54.873.000	38 lembaga	57.067.000	38 lembaga	58.779.000	38 lembaga	61.130.000	38 lembaga	62.658.000	38 lembaga	294.507.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pera ngkat Daerah Peng amp u Urusan	Lokas i
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - x 100% Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya	39,49 %	39,61 %	1.222.545.900	39,71 %	1.796.942.850	39,83 %	1.948.493.000	39,85 %	1.986.784.670	39,90 %	2.007.977.378	39,95 %	2.038.994.497	39,95 %	9.779.192.395	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pena ngkat Daer ah Peng amp u Urus an	Lokas i
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.04.2 .01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	%	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----- ----- x 100% Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di daerah kab/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100%	100%	1.140.653.100	100%	1.614.661.400	100%	1.734.749.000	100%	1.767.396.670	100%	1.781.270.000	100%	1.802.828.997	100%	8.700.906.067	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pera ngkat Daerah Peng amp u Urusan	Lokas i
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.04.2 .01.0001	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.082 orang	200 Orang	59.620.000	200 orang	120.787.200	200 orang	221.408.000	200 orang	230.504.000	200 orang	239.601.000	200 orang	249.445.000	200 orang	1.061.745.200	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.04.2 .01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 orang	30 Orang	2.310.000	30 orang	10.000.000	30 orang	11.370.000	30 orang	12.000.000	30 orang	11.500.000	30 orang	13.150.000	30 orang	58.020.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.04.2 .01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kab/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kab/Kota	177 orang	136 orang	479.572.500	80 orang	480.523.000	80 orang	482.371.000	80 orang	484.115.000	80 orang	486.309.000	80 orang	488.284.000	80 orang	2.421.602.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pera ngkat Daerah Peng amp u Urusan	Lokas i
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.04.2 .01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 orang	100 orang	589.958 .400	100 orang	975.000 .000	100 orang	984.750 .000	100 orang	1.006.5 32.670	100 orang	1.009.1 25.000	100 orang	1.016.5 97.997	100 orang	4.992.0 05.667	Dinas Sosial	Kabu pate n Blitar
		1.06.04.2 .01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	17 orang	10 orang	2.555.0 00	10 orang	10.000. 000	10 orang	10.425. 000	10 orang	11.250. 000	10 orang	11.100. 000	10 orang	10.650. 000	10 orang	53.425. 000	Dinas Sosial	Kabu pate n Blitar
		1.06.04.2 .01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	31 orang	20 Orang	2.895.0 00	20 orang	10.270. 000	20 orang	16.325. 000	20 orang	14.880. 000	20 orang	15.425. 000	20 orang	16.350. 000	20 orang	73.250. 000	Dinas Sosial	Kabu pate n Blitar
		1.06.04.2 .01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kab/Kota	Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kab/Kota	11 orang	20 Orang	2.792.2 00	20 orang	9.454.0 00	20 orang	10.000. 000	20 orang	10.235. 000	20 orang	10.563. 000	20 orang	9.850.0 00	20 orang	50.102. 000	Dinas Sosial	Kabu pate n Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pena ngkat Daer ah Peng amp u Urus an	Lokas i
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan	3 orang	5 orang	950.000	5 orang	8.081.200	5 orang	8.100.000	5 orang	8.115.000	5 orang	8.210.000	5 orang	8.352.000	5 orang	40.858.200	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pelayanan yang Diberikan Kepada PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	Jenis Layanan	Jumlah Pelayanan yang Diberikan Kepada PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	4 jenis layanan	4 Jenis Layanan	81.892.800	4 Jenis Layanan	182.281.450	4 Jenis Layanan	213.744.000	4 Jenis Layanan	219.388.000	4 Jenis Layanan	226.707.378	4 Jenis Layanan	236.165.500	4 Jenis Layanan	1.078.286.328	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pera ngkat Daerah Peng amp u Urusan	Lokas i
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	119 orang	100 orang	57.000.000	100 orang	58.294.000	100 orang	59.944.000	100 orang	61.593.000	100 orang	63.336.378	100 orang	67.742.500	100 orang	310.909.878	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota	77 orang	100 orang	18.115.200	100 orang	54.644.650	100 orang	79.630.000	100 orang	82.450.000	100 orang	85.270.000	100 orang	88.290.000	100 orang	390.284.650	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pera ngkat Daerah Peng amp u Urusan	Lokas i
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.04.2.02.0012	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 orang	30 orang	1.975.000	30 orang	10.245.000	30 orang	10.945.000	30 orang	10.300.000	30 orang	11.265.000	30 orang	11.405.000	30 orang	54.160.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	27 orang	15 Orang	4.802.600	15 orang	59.097.800	15 orang	63.225.000	15 orang	65.045.000	15 orang	66.836.000	15 orang	68.728.000	15 orang	322.931.800	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial ----- x 100% Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Ada	78,02 %	78,05 %	10.601.182.500	78,07 %	3.490.985.500	78,09 %	3.579.458.000	78,12 %	3.644.418.000	78,15 %	3.716.885.500	78,17 %	3.766.179.000	78,17 %	18.197.926.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pera ngkat Daerah Peng amp u Urusan	Lokas i
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS, PBI-JK dan PPKS yang divalidasi Dan diverifikasi	%	Pendataan fakir miskin dan/atau PPKS lainnya meliputi pendataan baru serta pemutakhiran data (verifikasi dan validasi)	100%	100%	10.601.182.500	100%	3.490.985.500	100%	3.579.458.000	100%	3.644.418.000	100%	3.716.885.500	100%	3.766.179.000	100%	18.197.926.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Orang	Pendataan fakir miskin meliputi pendataan baru dan/atau pemutakhiran data warga miskin	113.551 orang	113.551 orang	238.300.400	113.551 orang	783.640.500	113.551 orang	830.658.000	113.551 orang	854.168.000	113.551 orang	871.398.000	113.551 orang	877.677.000	113.551 orang	4.217.541.500	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/ Kota	Orang	Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat merupakan bantuan sarana usaha bagi pemilik embrio usaha Penerima Manfaat adalah masyarakat Kabupaten Blitar yang terdaftar	50 orang	50 Orang	60.000.000	50 orang	163.060.000	50 orang	165.660.000	50 orang	168.360.000	50 orang	171.160.000	50 orang	174.060.000	50 orang	842.300.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						pada DTSEN desil 1-5 Pemilik embrio usaha adalah penerima Bansos yang sudah mempunyai rintisan usaha																	
		1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota adalah bantuan sosial dari Dinas Sosial baik berupa uang/barang melalui sistem tunai/non tunai Penerima manfaat adalah warga miskin dan rentan	8.250 Orang	8.125 orang	10.302.882.100	8.125 orang	2.544.285.000	8.125 orang	2.583.140.000	8.125 orang	2.621.890.000	8.125 orang	2.674.327.500	8.125 orang	2.714.442.000	8.125 orang	13.138.084.500	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampunan Urusan	Lokasi
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana ----- x 100% Populasi Korban Bencana Alam/Sosial	60,88 %	60,90 %	177.887.250	60,92 %	1.037.355.000	60,93 %	1.472.257.866	60,95 %	1.527.018.258	60,96 %	1.734.741.485	60,98 %	1.644.282.866	60,98 %	7.415.655.475	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan dalam masa tanggap darurat dan Pasca Bencana	%	Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana ----- ----- x 100% Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang Seharusnya Memperoleh	100%	100%	86.929.750	100%	298.836.500	100%	702.363.866	100%	735.661.258	100%	921.268.485	100%	810.813.866	100%	3.468.943.975	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pera ngkat Daerah Peng amp u Urusan	Lokas i
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						Bantuan Sosial																	
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	250 orang	1.000 Orang	65.898.950	1000 orang	1.008.716.000	1000 orang	564.838.866	1000 orang	596.676.258	1000 orang	778.923.485	1000 orang	664.838.866	1000 orang	3.613.993.475	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	48 orang	100 orang	8.128.400	100 orang	50.000.000	100 orang	51.050.000	100 orang	48.740.000	100 orang	47.795.000	100 orang	52.130.000	100 orang	249.715.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Pera ngkat Daerah Peng amp u Urusan	Lokas i
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota		Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota																	
		1.06.06.2 .01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota	48 orang	100 orang	8.993.200	100 orang	43.274.000	100 orang	47.850.000	100 orang	42.895.000	100 orang	45.800.000	100 orang	48.100.000	100 orang	227.919.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.06.2 .01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	14 orang	100 Orang	3.909.200	100 orang	39.575.000	100 orang	38.625.000	100 orang	47.350.000	100 orang	48.750.000	100 orang	45.745.000	100 orang	220.045.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar
		1.06.06.2 .02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/K	Persentase KSB (Kelompok Siaga Bencana) yang Terbentuk	%	Jumlah KSB yang Terbentuk ----- x 100% Jumlah Desa/Kelura	40%	40%	90.957.500	60%	738.518.500	60%	769.894.000	100%	791.357.000	100%	813.473.000	100%	833.469.000	100%	3.946.711.500	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	DO/Formulasi Perhitungan /Referensi Sumber Data	Baseline Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Pengampunan Urusan	Lokasi	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
								Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			ota			han yang Menjadi Target Pembentukan KSB																		
		1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kampung	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 kampung	10 kampung	2.720.000	10 kampung	330.467.500	10 kampung	350.295.000	10 kampung	360.209.000	10 kampung	370.123.000	10 kampung	380.599.000	10 kampung	1.791.693.500	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar	
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	Jumlah Tagana yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	48 orang	44 orang	88.237.500	44 orang	408.051.000	44 orang	419.599.000	44 orang	431.148.000	44 orang	443.350.000	44 orang	452.870.000	44 orang	2.155.018.000	Dinas Sosial	Kabupaten Blitar	
									17.336.637.864		15.315.119.808		16.296.373.729		16.642.552.731		17.134.897.021		17.459.227.830		82.848.171.119			

Pada penyusunan Kertas Kerja Renstra 2025-2029 terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 4 subkegiatan yang dihapus dari Kertas Kerja Renstra 2021-2026, diantaranya sebagai berikut:

1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
2. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten Asal;
3. Subkegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal;
4. Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota pada Program Pemberdayaan Sosial;
5. Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota pada Program Pemberdayaan Sosial;
6. Subkegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota pada Program Rehabilitasi Sosial.

Selain itu, terdapat 2 kegiatan dan 4 subkegiatan baru pada Kertas Kerja Renstra 2025-2029, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar;
2. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
3. Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
4. Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota pada Program Pemberdayaan Sosial;
5. Kegiatan Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah pada Program Pemberdayaan Sosial; dan
6. Subkegiatan Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Di samping itu, berdasarkan Kertas Kerja Renstra 2025-2029 terdapat beberapa pemutakhiran indikator program, kegiatan dan subkegiatan

menyesuaikan dengan maping Kemendagri 900.1.15.5-3406-24 yang dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2

Pemutakhiran Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial
	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya	Jumlah Izin/Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang Diterbitkan
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
	Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi dalam Penanganan Kasus Kewenangan

			Kabupaten/Kota
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<p>1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</p> <p>2. Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis</p>	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Persentase KSB (Kelompok Siaga Bencana) yang Terbentuk
--	---	--	---

Untuk pengukuran kinerja secara berkelanjutan dan konsisten, maka dalam bab VI disajikan tabel yang memuat Definisi Operasional Indikator Program, sebagaimana tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.3
Definisi Operasional Indikator Program

No	Program	Indikator	Definisi Operasional
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Jumlah SDM Kesos yang Mengikuti Pelatihan/Peningkatan Kapasitas ----- x 100% Jumlah Total SDM Kesos yang ada - SDM Kesos yang dihitung dalam capaian yaitu PSM, TKSK, Karang Taruna dan LKS
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi

		usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	kebutuhan dasarnya ----- x 100% Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya
4.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial ----- x 100% Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Ada - Keluarga miskin yaitu orang yang tercatat memiliki persentil di bawah 50 hasil pemutakhiran melalui aplikasi sidaksos
5.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana ----- x 100% Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang Seharusnya Memperoleh Bantuan Sosial

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan uraian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Penyusunan bab ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen Dinas Sosial dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan ini dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang meliputi indikator tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah (sesuai Bab IV), serta indikator kinerja program dan kegiatan (sesuai Bab VI). Indikator-indikator ini menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, sekaligus sebagai dasar evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah.

Sebagian dari indikator kinerja sasaran dalam Renstra ini juga ditetapkan sebagai **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Sosial Kabupaten Blitar, yang mencerminkan peran strategis dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama yang telah disusun dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Awal Periode Renstra (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya	4,19%	4,25 %	4,30 %	4,36 %	4,41 %	4,46 %	4,52 %	4,52%

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Awal Periode Renstra (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Penurunan Jumlah PPKS	0,37%	0,15%	0,17%	0,19%	0,21%	0,23%	0,25%	0,25%

Selain itu, bab ini juga memuat indikator **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang wajib dicapai dalam pelayanan dasar bidang sosial. Indikator SPM dapat diadopsi dari indikator kinerja sub kegiatan, kegiatan, atau program, dan disesuaikan dengan standar teknis SPM yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Tabel 7.3

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Awal Periode Renstra (2024)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.	Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/ Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan bidang sosial dalam lima tahun ke depan.

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya dokumen Renstra ini, maka ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Blitar wajib melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029 secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya, guna mencapai target sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra ini.
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD setiap tahun selama periode 2025–2029.
3. Kepala Dinas Sosial bersama seluruh aparatur melaksanakan evaluasi terhadap capaian hasil kinerja Renstra secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi ini bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahunan guna memastikan konsistensi antara perencanaan dan implementasi kebijakan di bidang sosial.
4. Apabila terdapat dinamika kebijakan nasional, provinsi, atau daerah yang berdampak pada urusan sosial, maka penyesuaian atas strategi dan sasaran dalam dokumen Renstra ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya dokumen Renstra ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki arah yang jelas dan terukur dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial secara berkelanjutan.